



Kejari Tuntaskan Kasus Pupuk

KETAPANG, TRIBUN - Kejaksaan Negeri Ketapang, menargetkan penuntasan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian dan Pertenakan Kabupaten Kayung Utara (KKU) yang merugikan Negara sekitar Rp 671.900.000, para akhir Agustus ini.

"Kasus pupuk di KKU juga ada dua tersangka dan dalam tahap pemeriksaan akhir. Mungkin kasus pupuk di KKU selesai di kita Agustus dan dilimpahkan ke pengadilan Pontianak awal September mendatang," kata Kasi Pidsus Kejari Ketapang, Josep Christian, di ruang kerjanya, Senin (18/8).

Kasus ini terungkap dari hasil temuan di lapangan, bahwa pemenang lelang, kontraktor CV Dua Putra Perkasa, mengadakan pupuk tidak sesuai spesifikasi. "Jumlahnya sesuai, hanya kualitas atau kandungan pupuknya yang tak sesuai kesepakatan," jelasnya.

"Hal itu berdasarkan hasil uji petugas dari Pontianak. Sehingga kerugian negara sesuai pemeriksaan BPK sebesar Rp 671.900.000 dari pagu dana Rp 786 juta," lanjutnya.

Selain itu, Kejari Ketapang juga sedang menuntaskan kasus dugaan korupsi pada peningkatan jalan Desa Jambi-Sukaramai, Kecamatan Manis Mata, yang merugikan negara

Rp 630 juta.

Terkait belum disidangkannya kasus peningkatan Jl Jambi-Sukaramai menurutnya memang disengaja. Lantaran pihaknya akan menunggu kasus pupuk di KKU agar bisa disidangkan bersamaan. "Nanti dua kasus ini akan disidangkan bersamaan untuk menghemat biaya," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan dua kasus itu berjalan lancar tak ada kendala. Saksi maupun tersangka sangat kooperatif mempermudah proses pemeriksaan. "Kasus pupuk masuk April 2014 dan kita targetkan September sudah dilimpahkan ke pengadilan di Pontianak," ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Kusnendar, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan tiap kasus secepatnya. Menurutnya, jika satu kasus sudah selesai maka pihaknya bisa fokus menangani kasus lain. Sebab di Ketapang cukup banyak menangani berbagai kasus.

Ia mengungkapkan, kasus korupsi yang diselesaikan pihaknya seperti kasus penyimpangan pelaksanaan pengerjaan pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara anggaran 2011. (bnd)